

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK Jateng

Halaman 1 dan 7

3.966 Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti

31 Daerah di Jateng Raih Opini WTP

SEMARANG - Pada semester I 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng mencatat 11.036 temuan pemeriksaan dengan 25.060 rekomendasi.

Dari total rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti 21.084 (84,13%), sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau belum ditindaklanjuti sama sekali 3.966 (15,82%), dan tidak dapat ditindaklanjuti 10 (0,03%).

Kepala Perwakilan BPK Jateng Hery Subowo mengatakan, pihaknya memantau tindak lanjut rekomendasi BPK pada akhir Juli 2018. Sebagian pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi, namun ada juga yang belum.

Salah satunya adalah persoalan aset yang pengelolaannya belum

tertib. Misalnya aset sulit ditelusuri, tak ada penilaian, aset dicatat secara gelondongan, dan aset yang bermasalah secara hukum.

"Meski sudah ditindaklanjuti, tapi kalau belum selesai 100% maka kami tetap mencatat belum selesai. Maka kami minta rekomendasi (Bersambung hlm 7 kol 1)

3.966....

(Sambungan hlm 1)

BPK segera dilakukan dan diselesaikan, karena itu akan memengaruhi opini (dari BPK)," kata Hery sesuai kunjungan kerja Komite IV DPD RI di kantor Perwakilan BPK Jateng, Selasa (27/11).

Hadir pada kunjungan tersebut Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang, koordinator kunker Bambang Sadono, Asisten Bidang Administrasi Pemprov Jateng Budi Wibowo, dan kepala SKPD pengelola

keuangan dan aset daerah dari delapan pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

Hery menambahkan, pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 35 kabupaten/kota dan Provinsi Jateng tahun 2016 yang diperiksa tahun 2017, 31 wilayah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sementara lima lainnya wajar dengan pengecualian (WDP).

Sementara, pada pemeriksaan semester pertama tahun ini ada 32 wilayah yang memperoleh opini WTP dan empat WDP (Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Klaten, dan Rembang).

Menurutnya, saat ini penyelesaian tin-

dak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK oleh pemerintah telah ditetapkan menggunakan mekanisme berbasis *online* dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK (SIPTLR-LHP BPK).

Dengan sistem ini, pejabat pemda dapat mengunggah langsung dokumen ataupun bukti TLRHP dari kantor pemda, dan BPK memantau tindak lanjut tersebut dari kantor BPK.

"Sistem ini sangat membantu pemda untuk memenuhi kewajiban penyelesaian TLRHP yang berdasarkan aturan ditetapkan-

kan dalam waktu 60 hari setelah LHP diserahkan," jelas Hery.

Tanggapan

Ajiep Padindang mengatakan, kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jateng dilakukan untuk mendapatkan informasi, tanggapan, dan penjelasan tentang temuan-temuan BPK yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, terlepas apakah sudah ataupun belum ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

"Hasil penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPD RI akan menjadi bahan untuk membuat pertimbangan

dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara," katanya.

Jateng merupakan salah satu dari tiga provinsi yang dikunjungi oleh Komite IV DPD terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2018.

Dua lainnya adalah Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Maluku. Jateng dipilih sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi karena tingkat opini BPK atas laporan keuangan pemda di Jateng yang relatif meningkat pada setiap tahun anggaran. (H81-19)